



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

SEMAKIN *PASTI* MENUJU INDONESIA MAJU
Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**KUMHAM
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2021 dapat tersusun. LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Suatu tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip dan nilai-nilai profesional, akuntabel, transparan, sinergi dan inovatif (PASTI). Sebagai wujud penerapan nilai-nilai tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini menyajikan data capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini disajikan untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip dan nilai-nilai PASTI sebagaimana tersebut di atas dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Untuk menyempurnakan laporan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya terus melakukan berbagai langkah perbaikan agar prinsip dan nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Transparan, Sinergi dan Inovatif (PASTI) yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Banda Aceh, 25 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, written over the printed name and title.

Meurah Budiman
196803041991031001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang menyajikan informasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara masing-masing Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Penyusunan LAKIP juga bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penyerapan anggaran yang telah dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian pada tingkat wilayah.

Pada tahun anggaran 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh beserta jajarannya memperoleh alokasi sebesar **Rp.265.212.833.000,-** (dua ratus enam puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan total realisasi sebesar **Rp.252.648.181.644,-** (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **95%**.

Anggaran tahun 2021 digunakan sebagai pelaksanaan 9 program dan seluruh kegiatan yang mendorong tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Program yang dilaksanakan antara lain:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
2. Program administrasi hukum umum;
3. Program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakat;
4. Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kekayaan intelektual;
6. Program pembentukan hukum;
7. Program pemajuan hak asasi manusia;
8. Program pembinaan hukum nasional;
9. Program penelitian dan pengembangan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan terdapat pelaksanaan indikator kinerja kegiatan yang berjalan tidak maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



1. Diakibatkan oleh pandemic Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah beserta jajaran;
2. Pelaksanaan Refocusing Anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dimana terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan lain yang berdampak pada pencapaian output yang tidak maksimal;
3. Maksimal Pencairan (MP) pada satker AHU sebesar Rp. 120.088.000- terjadi karena tidak adanya surat Persetujuan Maksimum Pencairan (MP) tahap IV dari Ditjen Anggaran Kemenkeu R.I hingga akhir bulan, sehingga mempengaruhi kegiatan dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
4. Kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM dan kualitas SDM;
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh akan terus melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata organisasi dan penempatan pegawai secara tepat waktu sesuai kebutuhan. Selain itu diperlukan adanya perencanaan yang baik dan terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program dan penyerapan anggaran sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh disampaikan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis/Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Pelaporan Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LAKIP dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”. Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kantor Wilayah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan hukum dan HAM dan juga pelaksana kebijakan-kebijakan strategis dari unit Eselon I di daerah. Oleh karenanya Kantor Wilayah mengampu dua program dalam pelayanan yaitu mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) dan mendukung pelayanan teknis (pelayanan eksternal) yaitu kepada masyarakat.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;



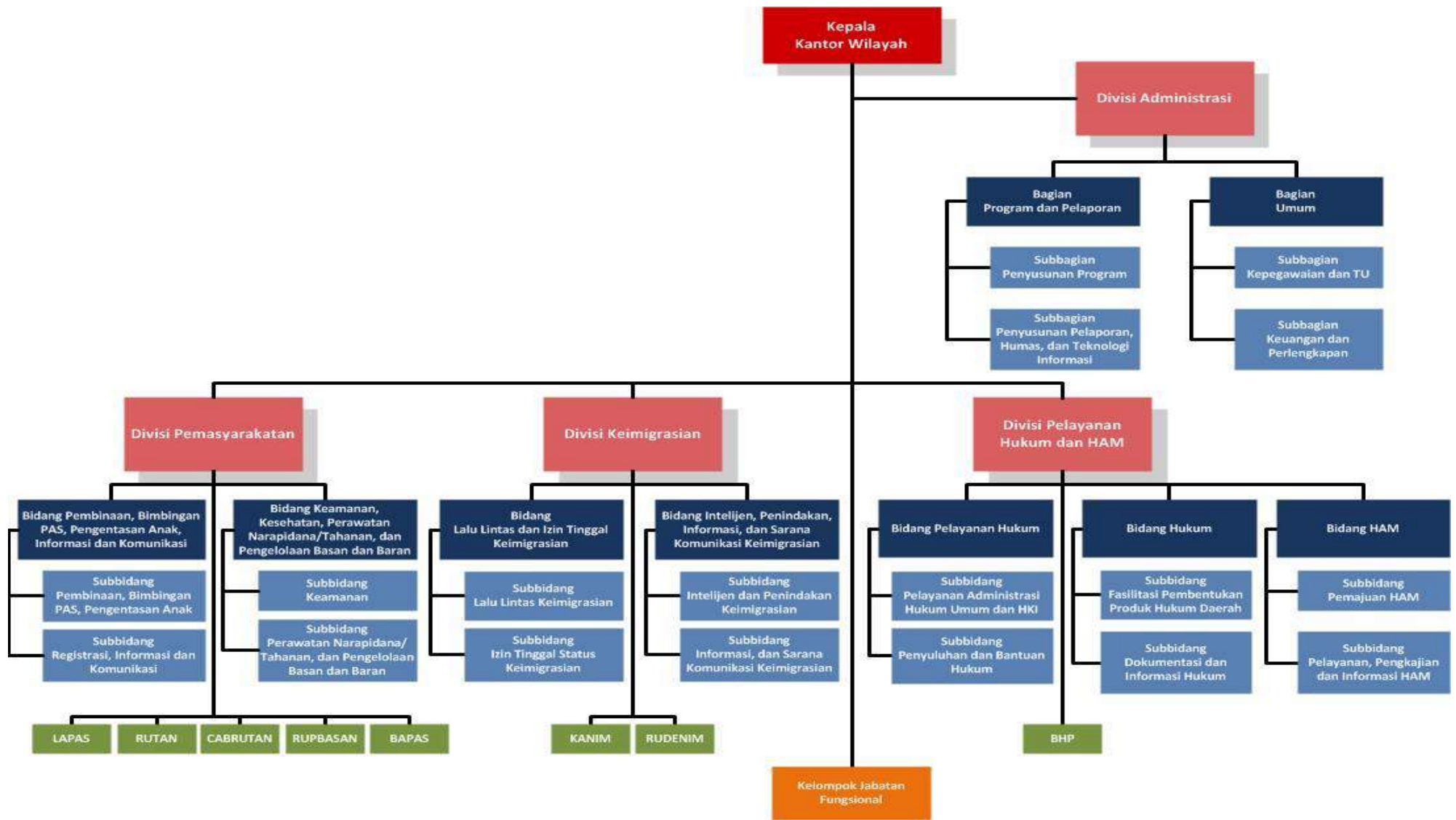
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Aceh dibantu oleh para Kepala Divisi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dalam pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dibidang administratif, masyarakat, hukum dan imigrasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Divisi pada Kantor Wilayah terdiri atas Divisi Administrasi, Divisi Masyarakat, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Berikut struktur organisasi Kantor Wilayah:





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh membawahi 37 (tiga puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya 31 (tiga puluh satu) UPT pemasyarakatan dan 6 (enam) UPT keimigrasian. Berikut nama UPT yang berada di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh;
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang;
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane;
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie;
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon;
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireueun;
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti;
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Rayeuk;
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren;
12. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh;
13. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa;
14. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli;
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang;
17. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang;
18. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga;
19. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang;
20. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah;
21. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
22. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan;
23. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli;
24. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho;
25. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;
26. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil;
27. Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh;
28. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane;
29. Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya;
30. Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe;
31. RUPBASAN Kelas I Banda Aceh;
32. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh;
33. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa;
34. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
35. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
36. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh;
37. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan jajaran yaitu sebanyak dengan alokasi sebagai berikut:

NO	Satuan Kerja	Jenis Kelamin		Total
		LK	PR	
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	96	64	160
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh	79	20	99
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe	55	7	62
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi	46	4	50
5	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang	53	8	61
6	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuta Cane	57	10	67
7	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie	49	5	54
8	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon	40	5	45
9	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen	41	5	46
10	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti	42	4	46
11	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa	54	6	60
12	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren	26	1	27
13	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh	50	9	59
14	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa	47	7	54
15	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli	27	30	57
16	Lembaga Pembinaan Khusus Anak	44	13	57
17	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang	21	4	25
18	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang	18	1	19
19	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga	38	13	51
20	Rumah Tahanan Kelas IIB Sabang	32	6	38
21	Rumah Tahanan Kelas IIB Bener Meriah	38	4	42
22	Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh	73	19	92
23	Rumah Tahanan Kelas IIB Tapaktuan	22	2	24
24	Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli	46	4	50
25	Rumah Tahanan Kelas IIB Jantho	50	5	55
26	Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon	38	7	45
27	Rumah Tahanan Kelas IIB Singkil	18	2	20
28	Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	33	27	60
29	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kuta Cane	31	4	35
30	Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya	8	0	8
31	Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe	12	1	13
32	RUPBASAN Kelas I Banda Aceh	35	6	41
33	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	50	27	77
34	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	24	10	34



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



35	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	30	8	38
36	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	25	2	27
37	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	17	4	21
38	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Takengon	19	6	25
TOTAL KESELURUHAN		1484	360	1844

D. Isu Strategis/Permasalahan

Isu strategis yang terjadi pada tahun anggaran 2021 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara umum yaitu:

1. Peran Kantor Wilayah khususnya fungsi Keimigrasian dalam penanganan kasus kapal yacht la datcha yaitu kapal pesiar berbendera Cayman Island yang memasuki perairan Aceh tanpa izin;
2. Pemandangan pengungsi Rohingya dari gedung BLK Kota Lhokseumawe ke Rudenim Medan dan Makassar;
3. Penanganan over kapasitas dan over stay di Lapas dan Rutan;
4. Meningkatkan pengawasan dan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan;
5. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder*;
6. Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan koordinasi TIMPORA;
7. Peningkatan akselerasi pelayanan dalam hal Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) bagi masyarakat melalui Organisasi Bantuan Hukum

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada tahun anggaran 2021 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Aceh yaitu :

1. Diakibatkan oleh pandemic Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah beserta jajaran;
2. Pelaksanaan Refocusing Anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dimana terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan lain yang berdampak pada pencapaian output yang tidak maksimal;
3. Maksimal Pencairan (MP) pada satker AHU sebesar Rp. 120.088.000- terjadi karena tidak adanya surat Persetujuan Maksimum Pencairan (MP) tahap IV dari Ditjen Anggaran Kemenkeu R.I hingga akhir bulan, sehingga mempengaruhi kegiatan dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
4. Kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM dan kualitas SDM;
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan.

Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai misi sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Implementasi rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020-2024, maka ditetapkan program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
2. Program administrasi hukum umum;
3. Program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kekayaan intelektual;
6. Program pembentukan hukum;
7. Program pemajuan hak asasi manusia;
8. Program pembinaan hukum nasional;
9. Program penelitian dan pengembangan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2021 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Aceh dengan Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditargetkan. Untuk mencapai hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditargetkan tersebut diturunkan perjanjian kinerja antara Kepala Divisi dengan Kepala Kantor wilayah dengan dialokasikan dana sesuai yang tercantum dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada tiap-tiap divisi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



1. Divisi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER SEKRETARIAT JENDERAL			
1	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.329.576.000
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah	Rp. 18.329.576.000

Namun dalam pelaksanaannya terdapat penambahan pada Belanja Pegawai sehingga pagu anggaran Satker Sekretariat Jenderal menjadi:

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.024.500.000
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah	Rp. 19.024.500.000

2. Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN PEMASYARAKATAN			
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan Penyuluhan Hukum	70%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi Bantuan Hukum	70%
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%
		2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	40%
4	Meningkatnya pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%
5	Meningkatnya pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	40%
		2. Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%
		2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi`	100%
		3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%
7	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%
		2. Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana.anak pelaku Gangguan Kamtib	75%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca Gangguan Kamtib secara tuntas	60%
8	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	71%
		2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		4. Persentase tahanan/narapidanan/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		7. Persentase keberhasilan	60%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika	23%
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	2
		2. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 81.376.321.000
Penyelenggaraan Masyarakat di wilayah	Rp. 81.376.321.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 160.951.096.000
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Masyarakat	Rp. 160.951.096.000

Namun dalam pelaksanaannya terdapat *refocusing* anggaran belanja modal sebesar Rp. 46.265.933.000,- sehingga total anggaran masyarakat di wilayah menjadi sebesar Rp. 196.061.484.000,-.

3. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN IMIGRASI			
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15%
		2. Indeks kepuasan internal di wilayah	3,11%
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,11%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 11.031.106.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	Rp. 11.031.106.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 31.249.017.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 31.249.017.000

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 besaran pagu pada Divisi Keimigrasian beserta perubahannya adalah sebesar Rp. 1.114.108.000,- yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipergunakan untuk Belanja Barang. Sedangkan untuk UPT Imigrasi di Aceh jumlah anggaran yang dilakokasikan adalah sebesar Rp. 43.740.577.000,-.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mempunyai 6 Satuan Kerja yaitu:

I. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN KI			
1	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	48 layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah yang handal	1. Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan Kantor Wilayah	1 kegiatan
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 945.915.000
Penyelenggaraan KI di wilayah	Rp. 945.915.000

II. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN HAM			
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah Instansi Pemerintah yang meindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 269.197.000
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah	Rp. 269.197.000

III. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN AHU			
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.401.760.000
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.401.760.000

IV. Direktorat Jenderal Perundang-undangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN PP			
1	Terfasilitasinya rancangan Produk Hukum di daerah	Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%
2	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 175.000.000
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di wilayah	Rp. 175.000.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



V. Badan Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN BPHN			
1	Terselenggaranya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan
2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		2. persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 103.354.000
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	Rp. 103.354.000
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.670.105.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di wilayah	Rp. 2.670.105.000

VI. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SATKER DITJEN BALITBANG			
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	70%
		2. Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 213.991.000
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di wilayah	Rp. 213.991.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dituangkan dalam formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 = \text{Capaian Kinerja}$$

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah dalam periode satu tahun dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasinya sehingga dapat terlihat persentase pencapaian target. Rincian pengukuran capaian kinerja masing-masing indikator target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Capaian perjanjian kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER SEKRETARIAT JENDERAL						
1	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,58	7,1	99,86

Indeks Kepuasan Internal diwilayah diambil dari survey Indeks Persepsi Korupsi pada Aplikasi Survey Balitbang yang dilaksanakan setiap bulan dengan perhitungan menggunakan skala 4. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Bulan	Nilai Survey
Januari	0
Februari	3,90
Maret	3,99
April	3,99
Mei	3,99



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Juni	3,94
Juli	3,98
Agustus	3,76
September	3,79
Oktober	3,87
November	3,90
Desember	3,85
Rata-rata	3,58

Sehingga nilai indeks kepuasan internal pada tahun 2021 adalah sebesar 3,58 lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, perhitungan indeks juga tercapai melebihi target dengan capaian angka 99,86% melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 7,1. Pengukuran pada tahun 2020 menggunakan skala 10, hal ini berbeda dikarenakan adanya perubahan skala pengukuran target pada Perjanjian Kinerja.

2. Divisi Pemasyarakatan

Capaian perjanjian kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN PEMASYARAKATAN						
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	98%	7,0%	90%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	70%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi Bantuan Hukum	70%	70%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



						sebelumny a)
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	40%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
4	Meningkatnya pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang	13%	13%		-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin			-	(Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	25%	-	(Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	25%	-	(Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
5	Meningkatnya pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	40%	5,33%	-	(Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	30,15%	-	(Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		3. Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	49,20%	55%	90%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	80%	-	(Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	-	(Terdapat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



						perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya a)
		3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya a)
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	85%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya a)
7	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya a)
		2. Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya a)
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana.anak pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya a)
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca Gangguan Kamtib secara tuntas	60%	80%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



						tahun sebelumny a)
8	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	71%	80%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		4. Persentase tahanan/narapidanan/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	80%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	85%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		7. Persentase	60%	80%		



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)			-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika	23%	50%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	2	0	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	1	1	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)

Penyelenggaraan Pemasarakatan diwilayah pada tahun 2021 terealisasi sebesar 98% dengan skala pengukuran dari penyerapan anggaran pada jajaran pemasarakatan di wilayah Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah telah terlaksana dengan baik.

Pada pelaksanaan penanganan overstaying pada UPT Pemasarakatan Aceh telah berjalan dengan baik (Nihil *Overstaying*) dan terus dilakukan monitoring oleh kantor Wilayah, namun terdapat beberapa UPT Pemasarakatan Aceh mengalami kendala terkait overstaying diantaranya:

- a. Lapas Kelas IIB Blangpidie (A5: 2 Orang)
- b. Lapas Kelas IIB Kotabakti (A5 : 1 Orang)
- c. Rutan Kelas IIB Banda Aceh (A1 : 1 Orang, A2: 3 Orang, A3 : 8 Orang, A4 : 2 Orang, A5 : 4 Orang).

Telah terlaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi berupa layanan penyuluhan hukum terhadap tahanan/narapidana/anak di Lapas/LPKA/Rutan se – Aceh sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 70% dengan uraian diantaranya :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



- a. Lapas Kelas IIB Kuala Simpang : 25 Orang/Tahanan oleh OBH PP3M Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Lapas Kelas IIB Bireuen : 20 Orang/Tahanan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh;
- c. Lapas Kelas III Calang : 21 Orang / Tahanan oleh OBH Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Banda Aceh;
- d. Lapas Kelas IIB Lhoksukon : 74 Orang / Tahanan oleh OBH Kabupaten Lhoksukon.

Telah terlaksanakan layanan bantuan hukum terhadap tahanan/narapidana/anak di Lapas/LPKA/Rutan se – Aceh sesuai dengan target yang ditetapkan diantaranya:

- a. Lapas Kelas IIB Bireuen (Litigasi : 15 Orang, Non Litigasi : 1 Orang)
- b. Lapas Kelas IIB Kuala Simpang (Litigasi : 23 Orang, Non Litigasi : 1 Orang);
- c. Lapas Kelas IIB Kota Bakti (Litigasi : 10 Orang, Non Litigasi : 10 Orang);
- d. Lapas Kelas IIB Lhoksukon (Litigasi : 74 Orang/Tahanan).

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya sebesar 100% dengan status nihil.

Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan Predikat Memuaskan pada Penilaian Instrumen Kepribadian sebesar 60%.

Adapun Jumlah pemberian pelayanan pembinaan dalam bentuk Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas secara online di UPT Pemasarakatan Aceh pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Remisi : 9809 Dokumen
 - Remisi Umum : 4947 Dokumen
 - Remisi Khusus : 4833 Dokumen
 - Remisi Umum Anak : 29 Dokumen
- b. Asimilasi : 2.053 Dokumen
- c. Pembebasan Bersyarat : 971 Dokumen
- d. Cuti Bersyarat : 206 Dokumen
- e. Cuti Menjelang Bebas : 75 Dokumen

Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada tahun 2021 adalah sebesar 80%.

Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan narapidana resiko tinggi dilakukan melalui assesmen resiko pada Bapas se – Aceh, namun hasil penilaian dan pengawasan narapidana resiko tinggi diusulkan untuk dipindahkan ke Lapas Wilayah Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Pada tahun 2021 Kanwil Kemenkumham Aceh telah melakukan pemindahan narapidana resiko tinggi ke Lapas Wilayah Nusakambangan sebanyak 54 Orang WBP dimana pelaksanaan tersebut berdasarkan dari hasil penilaian/assesmen dan pengawasan UPT Lapas/Rutan/Bapas se – Aceh. Adapun hasil pelaksanaan pengendalian / pengawasan narapidana resiko tinggi diketahui bahwa seluruh WBP yang telah dipindahkan ke Lapas Wilayah Nusakambangan telah mengalami perubahan perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin maka dengan hasil yang didapatkan persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 13 %.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Kegiatan pelatihan keterampilan narapidana dilaksanakan di beberapa UPT dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

UPT	JENIS KETERAMPILAN	JUMLAH WBP
Lapas Lhokseumawe	Pelatihan Pengelasan	40
	Pelatihan Pertukangan	40
	Pelatihan Handycraft Tas Aceh	30
	Pelatihan Bordier Aceh	30
LPP Sigli	Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring	15
	Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci tangan	15
	Pelatihan Pembuatan Sabun Batang	15
	Pelatihan Pembuatan Shampo	15
Lapas Lhoknga	Pelatihan Hidroponik	40
Lapas Banda Aceh	Pembuatan roti	40
	Pelatihan Pengelasan	40
Lapas Lhoksukon	Budidaya Ikan Lele	10
Lapas Blangpidie	Pelatihan Reparasi Helm Bekas	8
	Pelatihan Reparasi Galon Air	7
LPKA Banda Aceh	Pelatihan Pembuatan Masker Kain	5
	Budidaya Jagung dan Cabe	5
Lapas Meulaboh	Pelatihan Pengelasan	15
	Pelatihan Pertukangan	15
Rutan Banda Aceh	Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring	20
	Pelatihan Sablon Baju Manual	20
	Budidaya sayur pokcoy	20
Lapas Kuala Simpang	Pelatihan Pengelasan	15
Lapas Kota Bakti	Pelatihan Pembuatan Rak	20
LPN Langsa	Pelatihan Pembuatan Rak dan Lemari	20
	Budidaya semangka	20
TOTAL		520

Adapun Data Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	UPT (Bapas)	BULAN												Total	Jumlah Klien Bapas
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Se p	Okt	Nov	De s		
1	Bapas Kelas II Banda Aceh	0	0	1	0	0	0	12	10	4	5	2	1	35	2216
2	Bapas Kelas II Nagan Raya	3	7	5	10	9	12	6	10	11	13	12	10	108	611
3	Bapas Kelas II Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	80
4	Bapas Kelas II Kutaca	0	0	0	0	0	5	12	12	10	11	9	3	62	1011



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



NO	NAMA PENGASUH DAN PENDAMPING	NAMA ANDIK	KETERANGAN
1.	KHAIRUL IKHSAN NIP. 19941029 201712 1002BADRATUR RAHMI NIP. 199304282017122001	1. Ferdi Agustian 2. Rizki Maulana 3. Munawwar 4. Surya Helmi	TEUKU UMAR
2.	SAIPAN MAULANA NIP. 19970717 201712 1001SITI FURQAN NIP. 199108142017122001	1. M. Tifatul Mursalin 2. Andri Pratama 3. Jamris Mika 4. Rapi Mahendra 5. Aidil Wardian	TGK. FAKINAH
3.	MUSTAQINA NIP. 199210102017121001 LELI NOVITA NIP. 198411182010032003	1. Roni Lahanta 2. Efal Ahmadian 3. M. Riski 4. Iklasun	DAUD BEREUEH
4.	RIYAD HIDAYAD NIP. 19910121 201712 1003HUSNA NIP. 199401062017122001	1. Zikri Rahman 2. Alvin 3. M. Arif 4. Kautsar Abdul Azis 5. M. Maulana	MALAHAYATI
5.	AULIA RAHMAN NIP. 19930828 201712 1004FLORESY MAULIDYA U NIP. 199907012017122001	1. Ismail 2. Hamdi Adha 3. Muhammad Fadli 4. Riski Maulana	PANGLIMA POLEM
6.	FAHRIAN NIP. 198002052005011001 MISHRANNISA MAHDI NIP. 199511232017122001	1. Rahmat Saputra 2. Riski Chandra 3. Alwi Qadafi 4. M. Faisal 5. Mukhlisin	T. NYAK ARIF
7.	MIERLIANDA PEBJIRAM SYAHLIZA NIP. 19980213 201712 1001REFA JULAINA NIP. 199306032017122001	1. Bima Rezekillah 2. Firdaus Iqbal 3. Khairul Hawad 4. M. Azis 5. Hardi Mulianto	CUT MEUTIA

Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal terealisasi 85%. Secara keseluruhan jumlah Andikpas di Lapas/Rutan se – Aceh berjumlah 44 Andikpas diantaranya 33 Andikpas mendapatkan / mengikuti program Pendidikan baik formal maupun non formal.

Adapun Peserta Anak Didik Pemasarakatan yang mendapatkan Pendidikan formal dan non formal antara lain:

- Anak Peserta Pendidikan : 33 Andikpas
- Peserta Pembinaan Jasmani : 44 Andikpas
- Peserta Pembinaan Rohani : 44 Andikpas
- Peserta Konseling : 33 Andikpas
- Peserta Keterampilan : 33 Andikpas

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar terealisasi 100%. Pada tahun 2021 Divisi Pemasarakatan telah melakukan beragam bentuk kegiatan terkait



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



pengaduan dan pelanggaran kode etik seperti melakukan investigasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas / Rutan dan penanggulangan dan pencegahan gangguan kamtib seperti melaksanakan razia dan pengeledahan terhadap kamar dan blok hunian UPT Pemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian terkait pelaksanaan layanan pemasyarakatan yang sesuai standar pelayanan di UPT Pemasyarakatan Aceh;
- b. Melakukan Investigasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas / Rutan seperti kejadian pelarian di Lapas Banda Aceh, Lapas Kotabakti, Lapas Bireuen, Lapas Blangkejeren, Lapas Calang, Rutan Sigli, Rutan Banda Aceh dan Rutan Tapaktuan.
- c. Melaksanakan kegiatan investigasi terkait pengaduan masyarakat di UPT Lapas Lhokseumawe, Lapas Blangkejeren, Rutan Tapaktuan, Rutan Singkil beberapa UPT Pemasyarakatan lainnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Banda Aceh, LPKA , Lapas Lhoknga dan Rutan Banda Aceh ;
- e. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Calang dan Lapas Meulaboh;
- f. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Rutan Jantho, LPP Sigli, Rutan Sigli dan Lapas Kota Bakti;
- g. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Lhoknga, Lapas Blangpidie, Rutan Tapaktuan, Rutan Singkil;
- h. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Idi, Lapas Langsa, Lapas Narkotika, Lapas Kualasimpang;
- i. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Rutan Bener Meriah, Rutan Takengon, Lapas Blangkejeren, Lapas Kutacane;
- j. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Lapas Bireun, Lapas Lhokseumawe, Lapas Lhoksukon;
- k. Melaksanakan kegiatan pengeledahan barang-barang terlarang pada Rutan Sabang, dan Lapas Lhoknga;

Pada pelaksanaannya Kantor Wilayah Aceh telah melakukan pemetaan kerawanan ancaman gangguan kamtib di Lapas/Rutan Aceh (Deteksi Dini) namun hasil yang dicapai belum maksimal mengingat masih banyak Unit pelaksana teknis yang belum memahami pentingnya melakukan Deteksi Dini, hal ini masih dibuat sebagai bahan laporan, sistem lama masih terus dipakai secara manual berjaga dan mengontrol dan mengawasi, memang benar hal itu masih diperlukan namun untuk skala lebih besar untuk menciptakan rasa aman sangat sulit karena tidak terbaca gangguan kamtib yang akan muncul dari bidang mana dan apa sebagai pemicunya.

Dari hasil laporan deteksi dini yang di lakukan oleh UPT Pemasyarakatan se-Aceh dengan hasil sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



NO	NAMA UPT	POTENSI ANCAMAN				TOTAL SCORE	KET
		REG	WAT	BINA	KAMTIB		
1.	Lapas Kelas IIA Banda Aceh	16	35	60	98	209	36%
2.	Lapas Kelas IIA Lhokseumawe	18	32	20	18	88	15.17%
3.	Lapas Kelas IIB Kualasimpang	7	8	23	30	68	12%
4.	Lapas Kelas IIB Meulaboh	21	48	26	47	142	24.7%
5.	Lapas Kelas IIB Blangpidie	26	50	78	75	229	39.61%
6.	Lapas Kelas IIB Idi	28	38	63	74	203	35 %
7.	Lapas Kelas IIB Kotabakti	3	18	9	16	46	12%
8.	Lapas Kelas IIB Blangkejeren	15	23	35	64	137	23.70%
9	Lapas Kelas IIB Bireuen	19	21	71	39	150	26%
10.	Lapas Kelas IIB Lhoksukon	30	29	81	51	191	33%
11.	Lapas Kelas IIB Langsa	32	32	59	57	180	31%
12.	Lapas Kelas IIB Kutacane	54	56	104	113	327	56.57%
13	Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa	16	17	14	35	85	14.66%
14	Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli	11	14	9	28	62	10%
15.	LPKA Kelas II Banda Aceh	14	18	23	28	83	14.31%
16.	Lapas Kelas III Lhoknga	14	19	18	36	87	15.05%
17.	Lapas Kelas III Calang	21	43	57	65	186	32%
18.	Lapas Kelas III Sinabang	3	10	42	23	78	12%
19.	Rutan Kelas IIB Banda Aceh	20	28	28	30	106	18%
20.	Rutan Kelas IIB Sabang	6	26	65	36	133	22.93%
21.	Rutan Kelas IIB Jantho	22	28	55	66	171	29.58%
22.	Rutan Kelas IIB Bener Meriah	19	35	45	67	166	29%
23.	Rutan Kelas IIB Singkel	8	33	44	19	104	17.99%
24.	Rutan Kelas IIB Tapaktuan	23	38	65	55	181	31.21%
25	Rutan Kelas IIB Takengon	19	35	50	31	135	23.35%
26	Rutan Kelas IIB Sigli	33	27	62	76	198	34.25%

Hingga pada tahap ini masih tersisa Lapas Kelas IIB Kutacane dalam kondisi 56.57% artinya memiliki tingkat kerawanan ancaman gangguan kamtib yang tinggi, oleh karena Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan pengawasan keamanan dan ketertiban khususnya di Lapas Kutacane

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku Gangguan Kamtib telah berjalan dengan baik dimana Kantor Wilayah Aceh terus melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di sejumlah Lapas/LPKA/Rutan se Aceh diantaranya :

- a. Pengawasan terhadap Kurangnya Integritas Petugas/ Narapidana / Tahanan/ Anak Lapas/LPKA/Rutan se – Aceh;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



- Telah dilakukan upaya penguatan tugas dan fungsi pelaksanaan pemasyarakatan di Lapas / Rutan sesuai dengan aturan dan ketentuan / kebijakan yang berlaku;
 - Pelaksanaan penanganan penyimpangan, pelanggaran tata tertib yang responsif dan cepat tanggap sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Memberikan *reward* / penghargaan kepada Petugas Pemasyarakatan yang berprestasi dalam rangka meningkatkan semangat dan motivasi petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
 - Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh bagi petugas Lapas/Rutan;
 - Pelaksanaan Tugas Kontrol Keliling melalui Aplikasi SI-BANDROLL bagi Petugas Penjagaan / Pengamanan di Lapas / Rutan;
- b. Mengklasifikasi Narapidana umum dengan high risk (beresiko tinggi), dengan memisahkan blok hunian mereka agar pengawasan lebih maksimal;
- c. Melakukan assessmen RRI terhadap narapidana yang hukuman mati maupun seumur hidup yang dilakukan oleh pihak BAPAS;
- d. Melakukan pengawasan, pembinaan, pendekatan melalui WALI PAS yang ditunjuk berdasarkan Sidang TPP
- e. Telah dilakukan pemindahan narapidana / tahanan ke Lapas/Rutan lainnya dalam rangka pembinaan kedisiplinan dan keamanan lebih lanjut.

Upaya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dilakukan kepada sejumlah UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur secara tuntas. Adapun hal – hal yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan upaya pemulihan pasca kejadian penerobosan P2U oleh narapidana Lapas Lhoksukon pada bulan Mei 2021 dengan melakukan pemindahan Narapidana terkait ke sejumlah Lapas / Rutan di Aceh;
- b. Telah dilaksanakan upaya pemulihan pasca kejadian pelarian narapidana di Lapas Blangpidie pada Bulan Juli 2021 dengan melakukan penguatan Tugas dan Fungsi Petugas Pengamanan serta meningkatkan petugas pengamanan / bantuan pengamanan dari TNI/POLRI (upaya peningkatan personil pengamanan dari TNI/POLRI juga dilakukan di seluruh Lapas/LPKA/Rutan se Aceh);
- c. Meningkatkan Koordinasi dan Pertukaran Informasi dengan Instansi Terkait di Lapas/Rutan yang mengalami gangguan Keamanan dan Ketertiban serta segera Menyelenggarakan Perjanjian/MoU dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI/BNN/BIN/BNPT)

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sudah sesuai dengan standar, dengan adanya aplikasi SIMONEV – BAMA maka pelaporan bama sudah tertata dengan baik.

Peningkatan di layanan kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak sudah berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama antara puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Dalam pelayanan ibu hamil dan menyesuaikan di UPT Pemasayarakatan sudah mendapatkan akses pelayanan yang bagus dan ibu hamil proses melahirkan di rujuk kerumah sakit sudah berjalan dengan baik dan untuk bayi ada mendapatkan bantuan sosial dari Dinsos seperti (bantuan susu, pakaian bayi, pampers dan makanan pendamping asi).

Dalam hal penanganan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang berjumlah 11 orang sudah terlaksana dengan baik,, dengan kerjasama dengan rumah sakit umum dan dokter jiwa.

Pelayanan disabilitas layanan kesehatan sesuai standar sudah berjalan dengan baik tetapi sarana dan prasarana masih kurang memadai.

Penanganan penyakit menular HIV/AIDS sudah tertangani dengan baik dengan kerjasama dengan KPA kabupaten kota dan Dinas kesehatan dan untuk TB Positif juga sudah terlayani dengan baik dengan kerjasama dengan puskesmas.

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama UPT	Target Rehabilitasi		Capaian Rehabilitasi	
		Medis	Sosial	Medis	Sosial
1.	Lapas Kelas IIA Banda Aceh	-	60	-	60
2.	Lapas Kelas IIB Narkotika Langsa	-	150	-	150

Tabel Rekapitulasi Rata-rata Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Peserta Layanan Rehabilitasi Narkotika Semester II Tahun 2021 di Wilayah:

a. Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Pengukuran WHOQoL	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bln 3 - Bln 0	2,533333	3,8166667	2,333333	3,3666667
Bln 6 - 0	20,8	24,2166667	25,25	37,05
Bln 6 - Bln 3	18,26667	20,4	22,91667	33,683333

Indeks Kualitas hidup bulan ke 3 pada domain 1,2,3 dan 4 jika dibandingkan bulan 0 indeks kualitas hidup bulan 6 meningkat pada domain 1,2,3,4 dibandingkan bulan 0. Indeks kualitas hidup bulan 6 meningkat pada domain 1,2,3,4 jika dibandingkan bulan 3.

b. Lapas Kelas IIB Narkotika Langsa

Pengukuran WHOQoL	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bln 3 - Bln 0	-2.83333	-1.21111111	-2.5	0.51111111



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Bln 6 – 0	14.58333	13.4333333	20.08333	24.038889
Bln 6 - Bln 3	17.41667	14.64444	22.58333	23.527778

Indeks Kualitas hidup bulan ke 0-3, kualitas hidup WBP rehabilitasi mengalami penurunandenganrata-rata penurunan pada domain 1 mencapai 2,8, domain 2 mengalami penurunan rata 1.2, domain 3 mengalami penurunan rata-rata sebanyak 2,5, domain 4 mengalami penurunan rata-rata sebanyak 0.5 namun pada bulan 3-6, kualitas hidup WBP rehabilitasi mengalami kenaikan. Dan secara keseluruhan kualitas hidup wbp rehabilitasi mengalami kenaikan.

Peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya refocussing anggaran
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Pembangunan Pagar telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021

Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan perjanjian kinerja 2020 terdapat banyak perbedaan sehingga untuk membandingkan capaian antara tahun 2021 dengan tahun 2020 tidak relevan.

3. Divisi Keimigrasian

Capaian perjanjian kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN IMIGRASI						
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15%	3,76%	7,3%	9,52%
		2. Indeks kepuasan internal di wilayah	3,11%	3,75%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,11%	3,82%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



						sebelum nya)
--	--	--	--	--	--	------------------

Terdapat beberapa Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan perjanjian kinerja 2020 terdapat banyak perbedaan sehingga untuk membandingkan capaian antara tahun 2021 dengan tahun 2020 tidak relevan.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi survey Balitbang dengan perhitungan menggunakan skala 20 dan 4. Karena target pada perjanjian kinerja menggunakan skala 4 maka untuk perhitungan dengan skala 4 tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat							
Bulan	Kanim Banda Aceh	Kanim Lhokseumawe	Kanim Langsa	Kanim Meulaboh	Kanim Sabang	Kanim Takengon	Rata-rata
JAN	3,88	3,73	3,65	0	0	3,7	2,49
FEB	3,78	3,77	3,79	3,69	3,93	3,76	3,79
MAR	3,76	3,93	3,76	3,91	3,83	3,74	3,82
APR	3,96	3,87	3,8	3,82	3,91	3,92	3,88
MEI	3,9	3,79	3,9	3,7	3,73	3,88	3,82
JUN	3,88	3,91	3,93	3,47	3,95	3,82	3,83
JUL	4	3,84	3,93	3,86	3,94	3,93	3,92
AGT	3,95	3,91	3,87	3,62	4	3,8	3,86
SEP	3,93	3,92	3,95	3,85	3,84	3,86	3,89
OKT	3,92	3,96	3,95	3,89	3,98	3,92	3,94
NOV	3,91	4	3,97	3,86	3,9	3,88	3,92
DES	3,98	4	3,91	3,79	4	3,84	3,92
RATA2	3,90	3,89	3,87	3,46	3,58	3,84	3,76

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 dilaksanakan setiap bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember. Setelah dirata-ratakan hasil survey dengan skala 4 dari setiap triwulan diperoleh angka indeks 3,76. Dengan demikian indeks yang telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 3,15. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, perhitungan indeks juga tercapai melebihi target dengan capaian angka 9,52% melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 7,3. Pengukuran pada tahun 2020 menggunakan skala 10, hal ini berbeda dikarenakan adanya perubahan skala pengukuran target pada Perjanjian Kinerja.

Indeks Kepuasan Internal diwilayah diambil dari survey indeks persepsi korupsi pada aplikasi survey Balitbang dengan perhitungan menggunakan skala 20 dan 4. Karena target pada perjanjian kinerja menggunakan skala 4 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah							
Bulan	Kanim Banda Aceh	Kanim Lhokseumawe	Kanim Langsa	Kanim Meulaboh	Kanim Sabang	Kanim Takengon	Rata-rata
JAN	3,83	3,88	3,67	0	0	3,7	2,51
FEB	3,77	3,83	3,63	3,45	3,95	3,83	3,74
MAR	3,67	3,96	3,68	3,93	3,87	3,65	3,79
APR	3,96	3,92	3,83	3,76	3,95	3,97	3,90
MEI	3,82	3,7	3,94	3,66	3,73	3,94	3,80
JUN	3,88	3,99	3,95	3,42	3,98	3,88	3,85
JUL	4	3,84	3,98	3,85	3,79	3,96	3,90
AGT	3,97	3,89	3,87	3,63	4	3,83	3,87
SEP	3,97	3,89	3,97	3,82	3,89	3,86	3,90
OKT	3,94	3,98	3,95	3,85	3,99	3,93	3,94
NOV	3,94	4	3,96	3,81	3,94	3,89	3,92
DES	3,99	3,97	3,92	3,74	4	3,88	3,92
RATA2	3,90	3,90	3,86	3,41	3,59	3,86	3,75

Hasil perhitungan memperoleh angka 3,75 yang merupakan rata-rata penggabungan hasil seluruh Kantor Imigrasi, maka nilai target Perjanjian Kinerja telah sebesar 100% dengan target capaian 3,11. Pada tahun 2020 tidak terdapat indikator Indeks Kepuasan Internal diwilayah sehingga tidak dilakukan perbandingan hasil tahun 2021 dengan tahun 2020.

Indeks Pengamanan Keimigrasian diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan responden dari masing-masing Divisi Keimigrasian. Hasil survey dipublikasikan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PW.01.02-002 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pemberitahuan Nilai Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2021.

Lampiran
Nomor : IMI.1-PW.01.02-002
Tanggal : 15 Desember 2021

Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021

No	Wilayah	Persentase Pengisian (Participant Rate)	Target Index	Nilai Index Yang Dicapai	Grade*	Keterangan
1	Aceh	100,00	3,11	3,82	A	Mencapai Target
2	Sumatera Utara	80,81	3,11	4	A	Mencapai Target
3	Kep. Riau	85,00	3,11	3,68	A	Mencapai Target
4	Riau	87,50	3,11	3,98	A	Mencapai Target
5	Sumatera Barat	80,00	3,11	3,82	A	Mencapai Target
6	Jambi	100,00	3,11	3,91	A	Mencapai Target
7	Bengkulu	100,00	3,11	3,85	A	Mencapai Target
8	Sumatera Selatan	90,00	3,11	3,89	A	Mencapai Target
9	Lampung	87,50	3,11	3,91	A	Mencapai Target
10	Bangka Belitung	100,00	3,11	3,91	A	Mencapai Target
11	Banten	71,43	3,11	4,00	A	Mencapai Target
12	DKI Jakarta	86,67	3,11	3,81	A	Mencapai Target
13	Jawa Barat	94,12	3,11	3,94	A	Mencapai Target
14	Jawa Tengah	93,33	3,11	3,88	A	Mencapai Target
15	Yogyakarta	100,00	3,11	3,89	A	Mencapai Target
16	Jawa Timur	97,14	3,11	3,99	A	Mencapai Target
17	Bali	88,89	3,11	3,94	A	Mencapai Target
18	NTB	82,50	3,11	4,00	A	Mencapai Target
19	NTT	92,86	3,11	3,84	A	Mencapai Target
20	Gorontalo	80,00	3,11	4,00	A	Mencapai Target
21	Kalimantan Barat	85,00	3,11	3,85	A	Mencapai Target
22	Kalimantan Tengah	75,00	3,11	3,83	A	Mencapai Target
23	Kalimantan Selatan	71,43	3,11	3,91	A	Mencapai Target
24	Kalimantan Timur	96,25	3,11	3,81	A	Mencapai Target
25	Sulawesi Selatan	86,67	3,11	3,88	A	Mencapai Target
26	Sulawesi Barat	100,00	3,11	3,83	A	Mencapai Target
27	Sulawesi Tengah	80,00	3,11	3,73	A	Mencapai Target
28	Sulawesi Tenggara	40,00	3,11	3,52	B	Mencapai Target
29	Sulawesi Utara	100,00	3,11	3,92	A	Mencapai Target
30	Maluku Utara	100,00	3,11	3,96	A	Mencapai Target
31	Maluku	85,71	3,11	3,81	A	Mencapai Target
32	Papua	93,33	3,11	3,71	A	Mencapai Target
33	Papua Barat	85,71	3,11	3,88	A	Mencapai Target

Grade*	Keterangan	Index
A	Sangat Baik	3,5234 - 4
B	Baik	3,0644 - 3,532
C	Kurang Baik	2,60 - 3,064
D	Tidak Baik	1 - 2,5996



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Nilai Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2021, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh memperoleh nilai sebesar 3,82 yang melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu 3,11. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 tidak terdapat indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian karena itu tidak dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi berupa Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinasi

➤ Koordinasi Pengawasan Orang Asing di wilayah

Kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di wilayah yang dilaksanakan adalah kegiatan koordinasi Timpora dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Divisi Keimigrasian	163.856.000	163.750.000	99,94%	2	2	100%
Kanim Banda Aceh	189.480.000	127.957.300	67,53%	4	4	100%
Kanim Lhokseumawe	162.390.000	124.587.600	76,72%	3	3	100%
Kanim Langsa	174.060.000	116.474.400	66,92%	3	3	100%
Kanim Meulaboh	318.850.000	194.794.000	61,09%	8	8	100%
Kanim Sabang	189.062.000	178.116.105	94,21%	2	2	100%
Kanim Takengon	217.680.000	150.857.000	69,30%	4	4	100%
Total	1.415.378.000	1.056.536.405	74,65%	26	26	100%

➤ Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Wilayah

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Wilayah merupakan fungsi utama pada Divisi Keimigrasian yang mencakup 61% dari alokasi anggaran pada Divisi Keimigrasian. Dalam hal pelaksanaan fungsi ini telah dilakukan oleh Divisi Keimigrasian terhadap 6 UPT yang terdiri dari pembinaan dan pengendalian bidang fasilitatif serta bidang teknis keimigrasian dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Divisi Keimigrasian	679.858.000	676.142.033	99,45%	12	12	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



b. Pelayanan Publik kepada masyarakat

➤ Layanan Penerbitan Paspor

Rincian jumlah penerbitan paspor yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kanim Banda Aceh	958.032.000	421.887.420	44.04%	30.000	2.330	7.77%
Kanim Lhokseumawe	575.026.000	384.034.000	66.79%	9.150	1.672	18.27%
Kanim Langsa	812.975.000	578.342.073	71.14%	9.150	707	7.73%
Kanim Meulaboh	655.971.000	422.786.700	64.45%	6.714	472	7.03%
Kanim Sabang	604.255.000	372.507.533	61.65%	967	98	10.13%
Kanim Takengon	594.765.000	355.372.442	56.39%	3.294	313	9.50%
Total	4.201.024.000	2.514.930.168	59.86%	59.275	5.592	9.43%

➤ Layanan Penerbitan Izin Tinggal

Rincian jumlah penerbitan izin tinggal yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kanim Banda Aceh	111.000.000	32.310.000	29.11%	1.000	345	34.50%
Kanim Lhokseumawe	71.405.000	59.929.400	83.93%	115	53	46.09%
Kanim Langsa	227.360.000	15.880.834	6.98%	73	18	24.66%
Kanim Meulaboh	77.674.000	65.946.500	84.90%	74	812	1097.30%
Kanim Sabang	191.679.000	130.026.501	67.84%	235	114	48.51%
Kanim Takengon	130.809.000	113.288.000	86.61%	70	56	80.00%
Total	809.927.000	417.381.235	51.53%	1.567	1.398	89.22%

c. Operasi Bidang Keamanan

➤ Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah

Rincian jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Divisi Keimigrasian	145.972.000	145.650.000	99.78%	8	8	100%
Kanim Banda Aceh	316.800.000	100.530.197	31.73%	24	24	100%
Kanim Lhokseumawe	255.000	238.191.000	93.41%	24	24	100%
Kanim Langsa	383.952.000	336.640.000	87.68%	24	24	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Kanim Meulaboh	293.100.000	280.761.000	95.79%	24	24	100%
Kanim Sabang	112.864.000	112.722.900	99.87%	12	12	100%
Kanim Takengon	201.600.000	131.254.878	65.11%	12	12	100%
Total	1.709.288.000	1.345.749.975	78.73%	128	128	100%

➤ Operasi Mandiri Di Wilayah

Rincian jumlah Operasi Mandiri Di Wilayah yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Divisi Keimigrasian	64.008.000	64.000.000	99.99%	2	2	100%
Kanim Banda Aceh	109.200.000	63.554.000	58.20%	6	10	167%
Kanim Lhokseumawe	83.535.000	82.252.300	98.46%	3	3	100%
Kanim Langsa	131.715.000	121.670.000	92.37%	5	5	100%
Kanim Meulaboh	52.200.000	50.885.000	97.48%	8	9	112%
Kanim Sabang	79.000.000	78.233.200	99.03%	3	3	100%
Kanim Takengon	96.489.000	68.961.857	71.47%	3	3	100%
Total	616.147.000	529.556.357	85.95%	30	35	117%

➤ Operasi Gabungan di Wilayah

Rincian jumlah Operasi Gabungan di Wilayah yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Divisi Keimigrasian	60.364.000	59.358.000	98.33%	1	2	200%
Kanim Banda Aceh	38.400.000	9.000.000	23.44%	2	2	100%
Kanim Lhokseumawe	69.980.000	48.450.000	69.23%	2	2	100%
Kanim Langsa	60.230.000	25.146.000	41.75%	2	4	200%
Kanim Meulaboh	62.900.000	60.860.000	96.76%	2	3	150%
Kanim Sabang	45.430.000	37.660.000	82.90%	2	2	100%
Kanim Takengon	65.580.000	55.412.100	84.50%	2	3	150%
Total	402.884.000	295.886.100	73.44%	13	18	138%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



➤ Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

Rincian jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Divisi Keimigrasian	50.000	0	0.00%	1	0	0%
Kanim Banda Aceh	47.800.000	1.800.000	3.77%	1	1	100%
Kanim Lhokseumawe	51.592.000	12.252.000	23.75%	1	1	100%
Kanim Langsa	20.150.000	0	0.00%	1	0	0%
Kanim Meulaboh	31.910.000	267.000	0.84%	1	1	100%
Kanim Sabang	48.685.000	0	0.00%	1	0	0%
Kanim Takengon	28.563.000	600.000	2.10%	1	0	0%
Total	228.750.000	14.919.000	6.52%	7	3	43%

Terdapat 3 (tiga) Kantor Imigrasi yang melaksanakan kegiatan terkait penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, namun tidak ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing.

d. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

➤ Tindakan Administrasi Keimigrasian

Kegiatan pengawasan dan pengendalian masyarakat yang terlaksana adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kanim Banda Aceh	94.840.000	67.008.849	70.65%	6	8	133%
Kanim Lhokseumawe	59.940.000	50.350.000	84.00%	2	2	100%
Kanim Langsa	160.829.000	78.022.232	48.51%	6	6	100%
Kanim Meulaboh	84.879.000	5.510.000	6.49%	3	1	33%
Kanim Sabang	17.853.000	3.705.000	20.75%	2	1	50%
Kanim Takengon	96.400.000	0	0.00%	2	0	0%
Total	514.741.000	204.596.081	39.75%	21	18	86%

➤ Pemeriksaan di TPI

Kegiatan Pemeriksaan di TPI yang terlaksana adalah sebagai berikut:

Satker	Pagu			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kanim Banda Aceh	184.960.000	48.867.600	26.42%	20.000	731	3.7%
Kanim Lhokseumawe	64.055.000	51.420.000	80.27%	1.100	724	66%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Kanim Langsa	70.588.000	14.980.000	21.22%	164	127	77%
Kanim Meulaboh	57.836.000	43.496.580	75.21%	800	4.374	545%
Kanim Sabang	75.670.000	45.559.900	60.21%	2525	1.327	53%
Kanim Takengon	0	0	0.00%	0	0	0%
Total	453.109.000	204.324.080	45.09%	24.589	7.283	30%

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
I. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Playanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN KI						
1	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	48 layanan	457 layanan	46 layanan	372 Layanan (Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya)
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	8 Lokus	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah yang handal	1. Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	-	- (Terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		2. Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan Kantor Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	2 lokus	1 Lokus (untuk tahun 2021 terjadi penurunan target dibandingkan tahun 2020 sehingga capaian)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



						kinerja menjadi 100%)
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	2 Laporan	3 Laporan	-	- (Terdapat perbedaan perjanjian kinerja sehingga tidak bisa diperbandingkan)

Rincian capaian sasaran strategis sebagai berikut:

NO	PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH ACEH	
	JENIS	JUMLAH
1	Permohonan Hak Cipta	47
2	Permohonan Merek	375
3	Permohonan Paten	2
4	Permohonan Indikasi Geografis	1
5	Permohonan Desain Industri	0
6	Permohonan Rahasia Dagang	0
7	Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	0
8	Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal	32
TOTAL		457

NO	PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH				
	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	WILAYAH	JUMLAH
1. Promosi dan Diseminasi					
	Diseminasi Merek dan Hak Cipta	17-03-2021	Aula Hotel Hermes	Kota Banda Aceh	50 orang
	Diseminasi Perlindungan Kekayaan Intelektual	25-03-2021	Aula Hotel Diana	Kab. Aceh Utara	50 orang
	Diseminasi Perlindungan Kekayaan Intelektual	27-05-2021	Aula Hotel The Pade	Kab. Aceh Besar	50 orang
	Promosi dan Diseminasi Merek	08-07-2021	Aula Hotel Pantai Barat	Kab. Aceh Jaya	50 orang
	Promosi dan Diseminasi Merek	05-08-2021	Aula Hotel Safira	Kab. Pidie	50 orang
	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	27-09-2021	Aula Hotel Kyriad	Kota Banda Aceh	50 orang

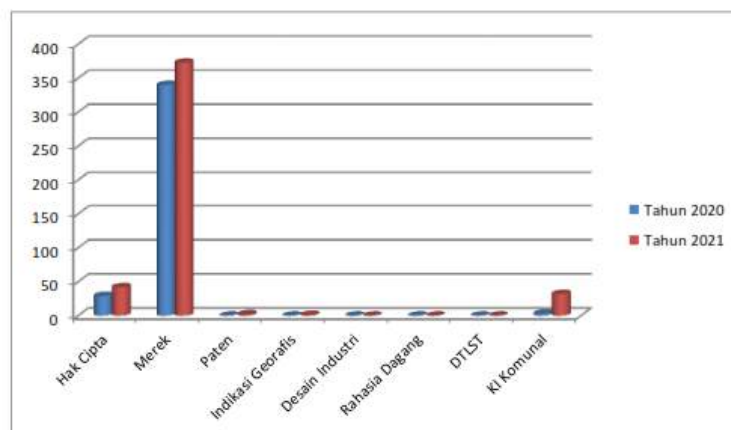
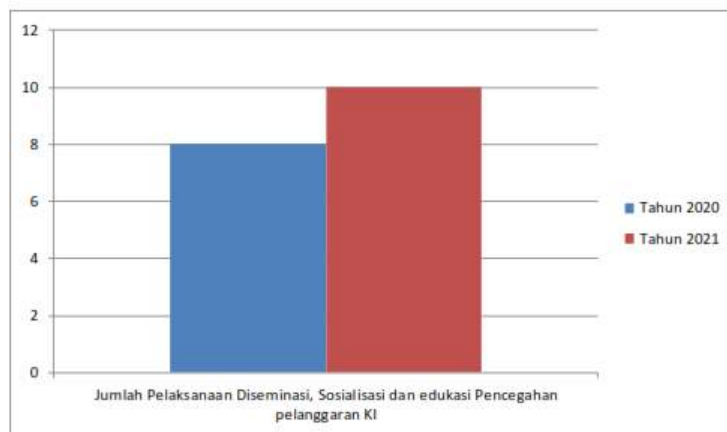


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



	Komunal				
	Seminar Urgensi Apprasial Paten dan Penegakan Hukum KI	04-10-2021	Aula Kanwil	Kota Banda Aceh	50 orang
2. Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual					
	Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	26-07-2021	Aula Dinas Pariwisata	Kab. Aceh Selatan	50 orang
3. Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual					
	Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual	04-11-2021	Aula Hotel Grand Nagan	Kab. Nagan Raya	50 orang

Capaian target Perjanjian Kinerja Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Pada grafik terjadi peningkatan baik dari segi pelaksanaan penyebaran informasi di bidang kekayaan intelektual maupun dari permohonan yang diajukan melalui Kantor Wilayah. Peningkatan jumlah pelaksanaan penyebaran informasi dibidang kekayaan intelektual meningkat 2 kegiatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, peningkatan ini terjadi karena adanya upaya untuk pemerataan penyebaran informasi disetiap kabupaten/kota yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, maka dari itu disaat penyusunan rencana kerja dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



anggaran disusun dengan perencanaan yang matang agar dapat melaksanakan kegiatan penyebaran informasi lebih banyak dan lebih luas, tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang berdampak pada peningkatan Penerimaan Bukan Pajak.

Sementara itu peningkatan pada jumlah kekayaan intelektual yang meningkat 20% dibandingkan tahun 2020 adalah dampak dari pelaksanaan penyebaran informasi, baik berupa diseminasi, sosialisasi maupun edukasi pencegahan yang dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota. Disamping itu juga dikarenakan adanya beberapa Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan antara Kantor Wilayah dengan beberapa Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selama ini banyak memfasilitasi para pelaku usaha binaan dari setiap kabupaten/kota untuk didaftarkan merek dagang maupun merek jasanya, penyerahan berkas permohonan pendaftaran merek bisanya dilakukan secara kolektif dan bertahap.

II. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN HAM						
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	13 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	19 Instansi Pemerintah (Terdapat penurunan target pada 2021 dibandingkan tahun 2020 namun realisasi tercapai 100%+)
		2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	0	23 Kab/Kota	9 Kab/Kota (Capaian lebih rendah daripada tahun sebelumnya dikarenakan surat Direktorat Jenderal HAM Nomor HAM-HA.02.02-17 bahwa penilaian Kab/Kota Peduli HAM ditunda.)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		3. Jumlah Instansi Pemerintah yang meindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah (terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya)
2	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomen dasi	3 rekomen dasi	3 rekomen dasi	3 rekomen dasi (Capaian Tahun 2020 dengan tahun 2021 adalah tetap)

Kegiatan pelaksanaan Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2021 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan Pemantauan Capaian Aksi HAM pada pelaporan B04 berjumlah 16 Kab/Kota sementara pelaporan B08 berjumlah 13 Kab/Kota.

Untuk Jumlah Kab/Kota Peduli HAM pada tahun 2021 tidak terlaksana karena berdasarkan surat Direktorat Jenderal HAM Nomor HAM-HA.02.02-17 bahwa penilaian Kab/Kota Peduli HAM ditunda.

Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. UPT yang memperoleh penghargaan sebanyak 23 Unit, yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti
- d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang
- e. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane
- f. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh
- g. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa
- h. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli
- i. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang
- j. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga
- k. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh
- l. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh
- m. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah
- n. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
- o. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang
- p. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon
- q. Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh
- r. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
- s. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa
- t. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
- u. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
- v. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh
- w. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



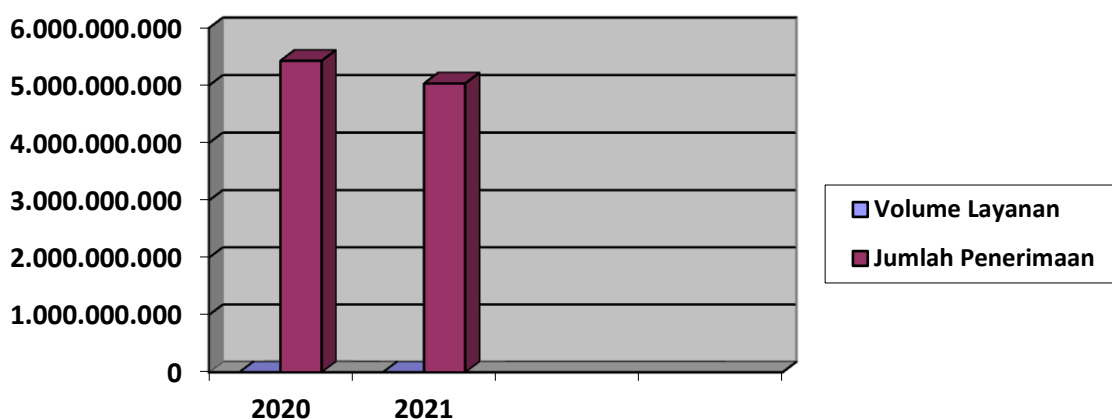
Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan HAM di wilayah pada tahun 2021 menghasilkan 3 rekomendasi dimana 2 rekomendasi Produk Hukum Qanun Propinsi dan Kabupaten Kota serta 1 rekomendasi Kasus Yankomnas sehingga target pada Perjanjian Kinerja tercapai.

III. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM						
1	Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan Admintrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	- 8%	5%	-0,04% (terjadi peningkatan PNBP dibandingkan tahun sebelumnya walaupun secara reel masih dibawah target)
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW,MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80%	14 Pengaduan	12 pengaduan	12 pengaduan

Pada Tahun 2021 capaian PNBP Kanwil Aceh Sebesar Rp. 5.038.600.000,- (Lima milyar tiga puluh delapan juta enam ratus rupiah) berikut grafik perbandingan capaian PNBP dari tahun sebelumnya.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



PNBP pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana PNBP pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.432.200.000,- dengan persentase penurunan sebesar -8%. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendaftaran layanan AHU di wilayah. Sementara jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kantor Wilayah selama tahun 2021 adalah sebanyak 5 kasus dan semua kasus telah terselesaikan.

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2021 berupa Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan di Wilayah, Koordinasi dengan Instansi terkait dan Layanan AHU di wilayah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Penyelesaian permasalahan kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis kehormatan di Wilayah
 - Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Untuk Tahun 2021, MPWN telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat;
 - Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada Majelis Pengawas Daerah Notaris
Pengawasan dan Pembinaan Notaris di Kabupaten Kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, saat ini Jumlah Majelis Pengawas Daerah Notaris di Aceh berjumlah 6 (enam) Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu : Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Besar, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Barat, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Utara, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Timur, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Tengah;
 - Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Untuk Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan penanganan terhadap 6 (enam) orang Notaris yang dilakukan oleh pemanggilan oleh Pihak Penyidik Kepolisian. Berdasarkan pertimbangan Tim MKNW, maka yang diberikan ijin untuk pemeriksaan oleh Penyidik hanyalah 1 (satu) orang Notaris, sedangkan empat orang lainnya tidak diberikan karena dianggap tidak terkait dengan perkara yang sedang di sidik.
- b. Koordinasi Divyankum dengan Instansi terkait
 - Koordinasi dengan Intansi Terkait
Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan Layanan AHU baik secara teknis maupun substansi dengan instansi pemerintah, penegak hukum, pejabat publik guna menunjang pelaksanaan kegiatan Layanan AHU di Wilayah;
 - Koordinasi dengan Unit Pusat
Kegiatan Koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk mengkoordinasikan permasalahan- permasalahan Layanan AHU baik secara teknis maupun substansi ke Unit Pusat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



guna memperoleh petunjuk dan tindak lanjut dan kegiatan koordinasi dengan unit pusat juga sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi Hukum umum di wilayah dalam pelaksanaannya di daerah.

c. Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

➤ Layanan Kewarganegaraan

Kegiatan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan dan Layanan kewarganegaraan belum terlaksana karena tidak ada yang melakukan pendaftaran pada Kantor Wilayah;

➤ Pelantikan PPNS

Pada Tahun Anggaran 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Telah melakukan pelantikan terhadap 7 Orang PPNS;

➤ Pelantikan Notaris

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Telah melakukan pelantikan terhadap 30 orang Notaris dan 1 Orang Notaris Pengganti, sampai Bulan Desember 2021 terdapat 205 orang Notaris di Provinsi Aceh.

➤ Layanan AHU Lainnya

Pelaksanaan kegiatan layanan AHU Lainnya ini guna untuk menampung dan memberikan diskusi terkait dengan Layanan AHU di wilayah dan Mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah digunakannya Notaris sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan; dan Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang dan , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

➤ Sosialisasi/Desiminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/workhop/Pedalaman Materi Layanan AHU

- Webinar Pengisian Kuesioner Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Tata cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan Peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari Notaris di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh adapun Narasumber berjumlah 2 orang yang berasal dari PPATK;
- Sosialisasi Kewarganegaraan dengan Tema “Pentingnya Status Kewarganegaraan Untuk Memperoleh Kepastian Hukum dilaksanakan pada tanggal 29 April bertempat di Nagoya Hotel Sabang dengan Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Intansi terkait, Aparatur Gampong, Warga Negara Asing (Kawin Campur) dan Narasumber berjumlah 2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



orang yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Kepala Divisi Imigrasi;

- Diseminasi Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Kepada Korporasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021, bertempat di Aula Hotel Meuligoe Meulaboh dengan Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Notaris, Pemilik Koorporasi, Yayasan, Koperasi dan Instansi terkait dengan Narasumber berjumlah 2 orang yaitu dari Kantor Wilayah dan dari anggota INI Wilayah Aceh;
- Kegiatan Sosialisasi Perseroan Perseorangan di Wilayah “Meningkatkan Pemahaman Tentang Undang- Undang Cipta Kerja Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Wilayah” kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di The Royal Idi Hotel Aceh Timur dengan peserta berjumlah 60 Orang yang terdiri dari Instansi terkait, Notaris dan pelaku usaha dengan Narasumber berjumlah 2 orang yaitu berasal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
- Kegiatan Diseminasi Pelaporan Pemilik Manfaat (Benefecial Ownership) Kepada Koorporasi di Kabupaten Sigli dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di Hotel Grand Blang Hasan Sigli dengan peserta Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Notaris, Pemilik Koorporasi, Yayasan, Koperasi dan Instansi terkait serta Narasumber berjumlah 2 orang yaitu dari Kantor Wilayah dan dari PPATK ;
- Kegiatan Sosialisasi Perseroan Perseorangan di Wilayah “Meningkatkan Perekonomian melalui kemudahan Pendaftaran Perseroan Perorangan Bagi pelaku Usaha Kecil (UMK)” kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 bertempat di Hotel Diana Lhokseumawe dengan peserta berjumlah 60 Orang yang terdiri dari Instansi terkait, Notaris dan pelaku usaha serta Narasumber berjumlah 2 orang yaitu berasal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
- Kegiatan Sosialisasi Perseroan Perseorangan di Wilayah “Meningkatkan Perekonomian melalui kemudahan Pendaftaran Perseroan Perorangan Bagi pelaku Usaha Kecil (UMK)” kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di Hotel Meuligoe Meulaboh dengan peserta berjumlah 60 Orang yang terdiri dari Instansi terkait, Notaris dan pelaku usaha serta Narasumber berjumlah 2 orang yaitu berasal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
- Kegiatan Sosialisasi Perseroan Perseorangan di Wilayah “Meningkatkan Perekonomian melalui kemudahan Pendaftaran Perseroan Perorangan Bagi pelaku Usaha Kecil (UMK)” kegiatan dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2021 bertempat di Grand Bayu Hill Hotel Takengon dengan peserta berjumlah 60 Orang yang terdiri dari Instansi terkait, Notaris dan pelaku usaha serta Narasumber berjumlah 2 orang yaitu berasal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



- Diseminasi dan Penguatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Grand Arabia Hotel Kota Banda Aceh dengan peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Notaris, JFT perancang dan Penyuluh Hukum serta Pelaksanan di Kantor Wilayah, Narasumber berjumlah 2 Orang yaitu dari INI Pusat dan Badan pembinaan Hukum Nasional.
- Publikasi /Pameran/Helpdesk
Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat terhadap kebutuhan layanan Administrasi Hukum Umum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. maka Dalam Tahun Anggaran 2021, Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh melakukan Penyebaran Informasi Layanan Hukum Umum kepada Masyarakat melalui penyebaran brosur, pemasangan reklame, pameran layanan AHU dan melalui radio berupa iklan dan talkshow. Kegiatan tersebut melibatkan dari Unsur Notaris, Keimigrasian (masalah kewarganegaraan) dan juga dari Kantor Wilayah.

IV. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN PP						
1	Terfasilitasinya rancangan Produk Hukum di daerah	Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%	100%	20 raperda	44 Raperda (terjadi penurunan jumlah rancangan yang teralisasi di tahun 2021)
2	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 orang	25 orang	25 Orang	25 Orang (realisasi sama dengan tahun sebelumnya)

Untuk tahun 2021, perjalanan pengharmonisasian raqan ke kabupaten/kota sudah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali yang membutuhkan akomodasi dan telah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



dilaksanakan harmonisasi terhadap 30 (tiga puluh) raqan oleh perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Aceh yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang sebagai berikut:

- a. Harmonisasi Raqan Kota Langsa
 - Raqan Kota Langsa tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Langsa;
 - Raqan Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Daerah PT. Pelabuhan Kota Langsa;
 - Raqan Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perseroan Terbatas Pelabuhan Kota Langsa;
 - Raqan Kota Langsa tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pembangunan Berkelanjutan;
- b. Raqan Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Retribusi Daerah;
- c. Harmonisasi Kabupaten Bener Meriah;
 - Raqan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri Samar Kilang;
 - Raqan Kabupaten Bener Meriah tentang Pengendalian Covid 19
- d. Raqan Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Irigasi;
- e. Harmonisasi Raqan Kota Subulussalam;
 - Raqan Kota Subulussalam tentang Perlindungan Anak;
 - Raqan Kota Subulussalam tentang Pemberdayaan Perempuan;
 - Raqan Kota Subulussalam tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Raqan Kota Sabang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- g. Raqan Kabupaten Aceh Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues tentang Pengelolaan Asrama dan Mess Mahasiswa;
- i. Raqan Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemilihan Pengulu secara serentak;
- j. Harmonisasi Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Raqan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rentenir;
 - Raqan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung;
 - Raqan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - Raqan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
 - Raqan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Retribusi Pelayanan Pasar;
- k. Raqan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pengelolaan Sampah;
- l. Raqan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembangunan Keolahragaan;
- m. Harmonisasi Raqan Kabupaten Aceh Barat Daya;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



- Raqan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - Raqan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk Calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Raqan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - Raqan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemilihan Keuchik;
- n. Raqan Kabupaten Aceh Barat tentang Pemerintahan Kampung.

Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah ditahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah permohonan harmonisasi dari daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Perda yang dilaksanakan pada tanggal 13 September s/d 14 September 2021 bertempat di aula kanwil dengan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari Kabag Hukum Setda Kab/Kota, DPRK, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kab/Kota dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Aceh.

V. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2021	Realisasi 2021
SATKER DITJEN BPHN						
1	Terselenggaranya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah (terjadi peningkatan target dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian 100%)
2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	91%	237 orang	708 Orang (terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya)
		2. persentase permohonan	79%	84%	33	194



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			kegiatan	Kegiatan (terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	85%	-	- (Perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	-	- ((Perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	-	- (Perbedaan Perjanjian Kinerja dengan tahun sebelumnya)

Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebanyak dua kegiatan yaitu berupa Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kota Sabang, dan Bireuen serta perjalanan lokal ke Kantor DPR Aceh dan Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh. Sementara kegiatan Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah bertujuan untuk menginventarisir Prolegda yang masuk dalam prioritas tahun berjalan dan melakukan konsultasi dan komunikasi dengan DPRA/DPRK dalam rangka pengkoordinasian penyusunan Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Barat serta perjalanan lokal ke Bgian Hukum SETDA Kota Banda Aceh dan Biro Hukum Provinsi Aceh.

Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan non Litigasi dilaksanakan oleh 21 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dari 21 Lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diselesaikan sebanyak 492 dari 546 permohonan yang diterima oleh Kantor Wilayah dan Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang diselesaikan sebanyak 164 dari 196 permohonan yang diterima oleh Kantor Wilayah.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap 48 desa sadar hukum yang telah terbentuk pada tahun 2019 dengan status masih layak untuk mendapatkan predikat desa sadar hukum.

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif adalah sejumlah 48 anggota JDIHN dari jumlah anggota JDIHN sebanyak 48 anggota.

VI. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2020	Realisasi 2020
SATKER DITJEN BLITBANGHAM						
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian/ Pengkajian Badan Pengembangan Hukum dan HAM	60%	100%	60%	100%
		Hasil Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

B. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah dilakukan pada penyusunan laporan target kinerja B03, B06, B09, dan B12 dengan status capaian hijau.

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun 2020 013-01.2.408782/2021 Tanggal 23 November 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp.309.716.438.000,-. Namun dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2021 terjadi beberapa penyesuaian dalam rangka penanganan *Pandemic Covid-19* yang kita kenal dengan istilah Refocussing Anggaran.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Sehingga total anggaran secara keseluruhan menjadi Rp.265.212.833.000,-. Anggaran tersebut telah di bagi kedalam sembilan (9) DIPA dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan.

Penyerapan anggaran selama tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp.252.648.181644,- dengan persentase sebesar 95,26%. Hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 94% di tahun 2020.

Berikut rincian realisasi yang terbagi dalam beberapa DIPA di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

1. Divisi Administrasi

Pada tahun anggaran 2021, satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.648.755.000,- dengan realisasi sebesar 99%. Berikut tabel realisasi anggaran satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh:

Akun	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	11.243.531.000	11.037.973.726	98%
Belanja Barang	6.103.059.000	5.753.872.368	94%
Belanja Modal	1.677.910.000	1.652.880.000	98%

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen					
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	11.243.531.000	11.163.457.159	100%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.304.002.000	4.294.270.295	100%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Penelitian Pagu	124.640.000	122.650.000	99%
		Penyusunan Disbursement Plan	102.244.000	102.212.000	100%
		Analisa Kebutuhan	8.246.000	6.000.000	73%
		Koordinasi dan Konsultasi Capaian Kinerja Kanwil	185.247.000	179.457.080	97%
	Manajemen Keuangan Kanwil	Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan	267.988.000	263.095.000	99%
		Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan	9.080.000	5.497.700	61%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



	Layanan Umum	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	81.436.000	76.348.200	94%
	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Kendaraan Bermotor	975.335.000	975.335.000	100 %
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	605.500.000	580.470.000	96%
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	97.075.000	97.075.000	100 %
	Layanan SDM	Administrasi Kepegawaian	587.481.000	587.020.000	100 %
		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	103.650.000	103.356.000	100 %
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah SPIP	8.315.000	8.315.000	100 %
		Pembentukan Satker WBK/WBBM	50.770.000	50.730.000	100 %
		Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	14.530.000	14.140.000	100 %
	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik	122.490.000	122.263.932	100 %
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	126.840.000	124.836.000	99%
		Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan	6.100.000	5.949.750	98%
TOTAL			19.024.500.000	18.882.505.116	99%

2. Divisi Pemasyarakatan

Pada tahun anggaran 2021, Divisi Pemasyarakatan beserta jajaran memperoleh anggaran sebesar Rp. 196.061.484.000,- . Berikut tabel realisasi Divisi Pemasyarakatan beserta jajaran pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan					
Penyelengg	Pembinaan dan	Rapat Kerja	91.494.000	91.438.800	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Pelayanan Masyarakat di wilayah	Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Masyarakat di Wilayah	Teknis Masyarakat			%
		Koordinasi Teknis Masyarakat	67.440.000	67.398.000	100%
		Pameran Hasil Karya Narapidana	40.000	40.000	100%
		Monitoring dan Evaluasi	411.608.000	411.456.750	100%
	Pembinaan Layanan Masyarakat di wilayah	Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Masyarakat di Wilayah	326.357.000	316.921.300	98%
		Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	54.769.000	54.750.000	100%
	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Pengendalian UPT Masyarakat	360.600.000	360.600.000	100%
		Pemindahan WBP	10.000	10.000	100%
		Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	13.940.000	0	0%
	TOTAL			1.326.258.000	1.302.564.850

SATKER	PAGU	REALISASI	%
Divisi Masyarakat	1.326.258.000	1.302.564.850	98.21%
LP. Banda Aceh	13.406.425.000	13.112.576.695	97.81%
LP. Lhokseumawe	11.049.000.000	11.044.004.125	99.95%
LP. Langsa	8.375.302.000	8.335.644.247	99.53%
LP. Kuala Simpang	9.135.254.000	9.062.605.663	99.20%
LP. Meulaboh	9.026.163.000	8.974.728.641	99.43%
LP. Kutacane	9.274.916.000	9.064.466.614	97.73%
LPKN Langsa	9.130.151.000	9.013.838.811	98.73%
LPP Sigli	5.097.898.000	5.044.441.449	98.95%
LP. Blangpidie	5.072.406.000	4.954.461.810	97.67%
LPKA Banda Aceh	8.149.006.000	7.954.838.965	97.62%
Rutan Banda Aceh	11.199.495.000	11.045.859.157	98.63%
Rutan Jantho	7.965.870.000	7.947.958.626	99.78%
Rutan Sabang	3.281.387.000	3.279.517.344	99.94%
Rutan Sigli	7.729.445.000	7.588.260.210	98.17%
Rutan Tapaktuan	3.597.368.000	3.557.054.790	98.88%
Rutan Takengon	5.985.917.000	5.779.771.725	96.56%
Rutan Bener Meriah	5.269.109.000	5.110.274.481	96.99%
LP. Idi	6.997.585.000	6.891.507.610	98.48%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



LP. Lhoknga	5.749.327.000	5.516.353.297	95.95%
LP. Lhoksukon	7.007.798.000	6.567.364.630	93.72%
Rutan Singkil	3.376.381.000	3.368.536.952	99.77%
LP. Sinabang	2.791.671.000	2.750.569.394	98.53%
LP. Bireuen	7.888.619.000	7.727.051.695	97.95%
LP. Blangkejeren	4.140.613.000	3.870.951.162	93.49%
LP. Calang	3.075.205.000	3.058.181.083	99.45%
LP. Kota bakti	5.537.930.000	5.106.756.719	92.21%
Rupbasan Banda Aceh	2.916.352.000	2.838.085.358	97.32%
Bapas Banda Aceh	5.845.614.000	5.840.561.726	99.91%
Bapas Kutacane	3.280.672.000	3.195.735.694	97.41%
Bapas Nagan Raya	1.314.042.000	1.304.790.746	99.30%
Bapas Lhokseumawe	2.068.305.000	2.026.590.331	97.98
TOTAL	196.061.484.000	192.235.904.600	98.05

3. Divisi Keimigrasian

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Divisi Keimigrasian dan 6 (enam) UPT Imigrasi yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Anggaran yang telah disediakan telah membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan. Karena adanya *Refocussing* Anggaran selama masa pandemic covid-109 maka terdapat anggaran yang tidak dapat dipergunakan sehingga presentase realisasi anggaran tahun 2021 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Besaran realisasi penggunaan anggaran atas kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE SATKER	SATKER	TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
408785	Divisi Keimigrasian	1.114.108.000	1.108.900.033	99%
408573	Kantor Imigrasi Banda Aceh	12.172.011.000	9.592.157.596	73%
408040	Kantor Imigrasi Lhokseumawe	6.268.461.000	5.597.462.911	89%
409026	Kantor Imigrasi Langsa	7.234.906.000	6.068.071.811	84%
409032	Kantor Imigrasi Meulaboh	5.268.447.000	4.383.082.318	83%
627323	Kantor Imigrasi Sabang	4.750.271.000	4.005.894.698	84%
683533	Kantor Imigrasi Takengon	5.932.373.000	5.182.063.724	88%
TOTAL		43.740.577.000	35.937.633.091	82%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Anggaran yang telah disediakan telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan. Karena adanya refofusing anggaran selama masa pandemic Covid-19 maka terdapat anggaran yang tidak dapat dipergunakan sehingga persentase realisasi anggaran tahun 2020 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - I. Direktorat Kekayaan Intelektual

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan yang telah di anggarkan sebagaimana tertuang dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 945.915.000,-. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Penyelenggaraan KI di wilayah				
Layanan KI di Wilayah	Penyelesaian Penerimaan Permohonan KI	352.342.000	350.230.675	100%
	Melaksanakan promosi dan diseminasi KI	455.142.000	445.429.200	98%
Penegakan Hukum	Pencegahan Pelanggaran KI di wilayah	42.640.000	42.440.000	99%
Bidang KI di wilayah	Pendampingan Penanganan Aduan/pelanggaran KI di wilayah	25.220.000	24.726.000	98%
	Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	70.571.000	64.917.000	92%
TOTAL		945.915.000	927.742.875	98%

- II. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Pada tahun anggaran 2021, jumlah keseluruhan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah sebesar Rp. 269.197.000,-. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemajuan HAM					
Meningkatkan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Pemerintah Daerah yang	Pelaksanaan Koordinasi Aksi HAM	41.570.000	41.120.000	99%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



melaksanakan Program Aksi HAM	Melaksanakan Program Aksi HAM	Pemerintah Daerah			
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Pelaksanaan Fasilitas Proses Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM	43.370.000	43.370.000	100 %
	Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	78.990.000	78.278.000	99%
		Konsultasi teknis penyelenggara n pemajuan HAM di wilayah	33.635.000	30.445.900	90.5 %
	Data Pemajuan HAM Di Wilayah	3.450.000	3.450.000	100 %	
Meningkatkan Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Rekomendasi Analisis Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM	15.982.000	15.982.000	100 %
		Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	52.200.000	52.199.900	99%
Total			269.197.000	264.845.800	99%

III. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Untuk tahun anggaran 2021, Satker AHU pada Kantor Wilayah memperoleh alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.401.760.000,- dengan Realisasi Anggaran berdasarkan Maksimum pencairan (MP) dan Realisasi pada Aplikasi SAS sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kenotariatan Pada Majelis Pengawas			
Penanganan permasalahan kenotariatan pada MPW	133.280.000	114.538.000	86%
Penanganan permasalahan kenotariatan pada MPD	781.950.000	713.863.700	91%
Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKN	233.967.000	208.533.600	89%
Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait			
Koordinasi dengan instansi terkait	467.504.000	457.385.364	98%
Koordinasi dengan Unit Pusat	237.534.000	231.582.390	97%
Layanan Administrasi Hukum Umum			
Layanan Kewarganegaraan	14.430.000	0	0%
Pelantikan PPNS	3.500.000	3.170.000	91%
Pelantikan Notaris	21.900.000	8.860.000	40%
Layanan AHU Lainnya	88.930.000	69.291.000	78%
Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/webinar/workshop/pedalaman materi	434.252.000	402.083.700	93%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Publikasi/pameran/helpdesk	85.500.000	61.870.000	72%
Penanganan perkara pada Kantor Wilayah			
Advokasi	46.790.000	33.521.000	72%
Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah			
Pengawasan Kenotariatan pada MPW	33.337.000	0	0%
Pengawasan Kenotariatan	50.420.000	43.170.000	86%
Total	2.401.760.000	2.116.286.364	88 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Subbid Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2021 hingga bulan Desember Tahun 2021 telah berjalan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Sedangkan sisa anggaran Blokir MP sebesar Rp. 120.088.000- terjadi karena tidak adanya surat Persetujuan Maksimum Pencairan (MP) tahap IV dari Ditjen Anggaran Kemenkeu R.I hingga akhir bulan, sehingga mempengaruhi kegiatan dan realisasi anggaran yang telah direncanakan.

IV. Direktorat Jenderal Perundang-undangan

Pada tahun 2021 Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- yang terrealisasi dengan rincian yang tertuang dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
Program Pembentukan Hukum Daerah					
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	Rekomendasi Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah	Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah	126.649.000	126.468.400	99%
		Perencanaan Kegiatan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah	14.215.000	214.390	99%
	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	3.100.000	2.803.000	91%
		Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah	31.216.000	31.216.000	100 %
TOTAL			175.000.000	174.701.790	100 %



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



V. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pada tahun 2021, satker Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.422.348.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020 terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan Hukum Nasional					
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	52.394.000	52.393.900	100 %
		Analisa dan Evaluasi Hukum	12.260.000	12.260.000	100 %
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	38.700.000	38.371.200	100 %
	Fasilitasi JDIHN	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH	71.456.000	71.240.200	100 %
		Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi	25.812.000	24.092.100	94%
		Peningkatan Layanan Kepustakaan	5.900.000	5.900.000	100 %
	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	Pembinaan Kelompok KADARKUM	35.090.000	32.606.000	93%
		Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	22.550.000	22.550.000	100 %
	Layanan Penyuluhan Hukum	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung	97.360.000	94.831.000	98%
	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah	83.827.000	83.635.300	100 %
	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum	23.005.000	22.020.600	96%
		Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 sd 2024	56.995.000	56.495.000	100 %
		Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Pemeriksaan dan Bantuan Hukum Biasa	1.518.000.000	1.518.000.000
	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Penyebarnya Informasi dan Penanganan Perkara diluar	317.560.000	287.120.000	91%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



		Pengadilan			
TOTAL			2.380.409.000	2.337.855.330	98%

VI. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2021, jumlah keseluruhan anggaran satker Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Aceh memperoleh anggaran sebesar Rp.213.991.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 208.486.000,- dengan rincian dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM					
Rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase Rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian/ Analisis Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	206.666.000	201.161.000	97 %
	Hasil Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan HAM di Wilayah	7.325.000	7.325.000	100%
Jumlah			213.991.000	208.486.000	98%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja / Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun anggaran 2021 masih terdapat beberapa target yang pencapaiannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun anggaran 2021 yaitu karena adanya pembatasan aktifitas dan adanya pengurangan anggaran (*refocussing*) selama pandemic Covid-19 sehingga yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada pencapaian output. Namun secara umum kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya sistem kerjasesuai standar operasional prosedur dan didukung oleh suasana kerja dan tata nilai yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (pasti). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

Laporan Kinerja / LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2021 disusun sesuai dengan kaedah pelaporan Laporan Kinerja / LAKIP dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. di samping itu menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran serta rencana strategis pada masa mendatang .

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dikemukakan berbagai saran untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pemahaman yang baik tentang aspek anggaran berbasis kinerja serta kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan jajarannya;
2. Meningkatkan dan menguatkan prinsip/Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) baik internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan Jajarannya;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



3. Melakukan perencanaan yang baik dan mengacu pada disbursement plan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
4. Melakukan perencanaan dan pengadministrasian pengadaan barang dan jasa secara tepat dan akurat serta optimalisasi kinerja Unit Layanan Pengadaan dalam melakukan pengadaan berbasis informasi teknologi;
5. Melakukan optimalisasi anggaran dan kinerja dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang terkena pemotongan/penghematan anggaran sehingga target capaian tetap terpenuhi sesuai kontrak kerja.